



Dana Bagi Hasil Harus Rasional

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji berharap penetapan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah bisa lebih rasional. Ada dua indikator yang menurutnya relevan dijadikan dasar perhitungan yakni isu lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. "Kami minta ada bagi hasil yang lebih rasional. Artinya indikator bagi hasil antara daerah dengan daerah lain harusnya tidak sama," katanya usai menjadi Keynote Speaker pada Seminar Ekonomi Regional dengan bertajuk Dana Bagi Hasil yang Berkeadilan di Aula Kanwil DJPB Kalbar,



Kamis (21/11).

Harusnya menurut dia, yang pertama dana bagi hasil bisa diberikan tergantung sumber pendapatan negara dari daerah yang bersangkutan. Kaitan dengan Kalbar misalnya, pendapatan di sektor pertambangan dan perkebunan. Sehingga isu lingkungan harus menjadi salah satu indikator. "Supaya kalau daerah diperhatikan hal-hal seperti itu, maka dia juga akan berupaya bagaimana mendongkrak itu. Tapi kalau pukul rata semua, pasti akan bicara ketidakadilan," ujarnya.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1

Dana Bagi Hasil Harus Rasional

Sambungan dari halaman 9

Orang nomor satu di Kalbar mencontohkan Kabupaten Kapuas Hulu yang hampir 51 persen wilayahnya berupa kawasan konservasi. Artinya banyak wilayah yang harus dijaga dan tidak bisa diapa-apakan. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAU) yang diterima daerah tersebut sama saja dengan daerah lain. "Tidak ada insentif itu dan sebagainya. Bagi hasilnya pun tidak juga. Akhirnya apa, mereka tidak akan menjaga lingkungan, lingkungan rusak negara keluar duit juga. Kan itu, harusnya

berpikir seperti itu," paparnya.

Lalu yang kedua, ada indikator lain yakni pertumbuhan ekonomi. Harusnya daerah-daerah yang mampu meningkatkan perekonomian di atas rata-rata nasional berhak mendapat insentif lebih. "Sehingga daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekarang itu (pertumbuhan ekonomi) belum jadi parameter," imbuhnya.

Midji sapaan akrabnya melihat selama ini tolak ukur dalam menghitung dana bagi hasil terlalu jelimet. Terlalu banyak indikator yang ditetapkan. Salah satunya soal WTP yang

dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang ini kan 84 persen sudah WTP seluruh daerah, nah ngapain lagi itu jadi dasar. Bagus kan pertumbuhan (ekonomi). Pertumbuhan yang paling bagus, sama isu lingkungan, dua hal itu," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalbar Edih Mulyadi mengatakan, digelar seminar ini sekaligus untuk mendengar apa yang menjadi perhatian daerah. Meski memang untuk parameter atau formulasi perhitungan dana bagi hasil sudah diatur lewat UU. Jikapun ingin diubah

tentu perlu proses yang panjang. "Tapi setidaknya kalau ada masukan secara formal, makanya kami disukusikan ada masukan yang sangat mendasar menurut saya tadi," katanya. Dengan demikian pokok-pokok pikiran dari hasil seminar ini nantinya bisa menjadi bahan masukan ke pusat. "Walaupun saya juga tidak berharap banyak karena ini menyangkut legislasi di UU. Setidaknya ini salah satu hal yang positif untuk memberikan sisi lain ke pemerintah pusat, bagaimana daerah menyikapi terkait bagi hasil ini," tutupnya. (bar)